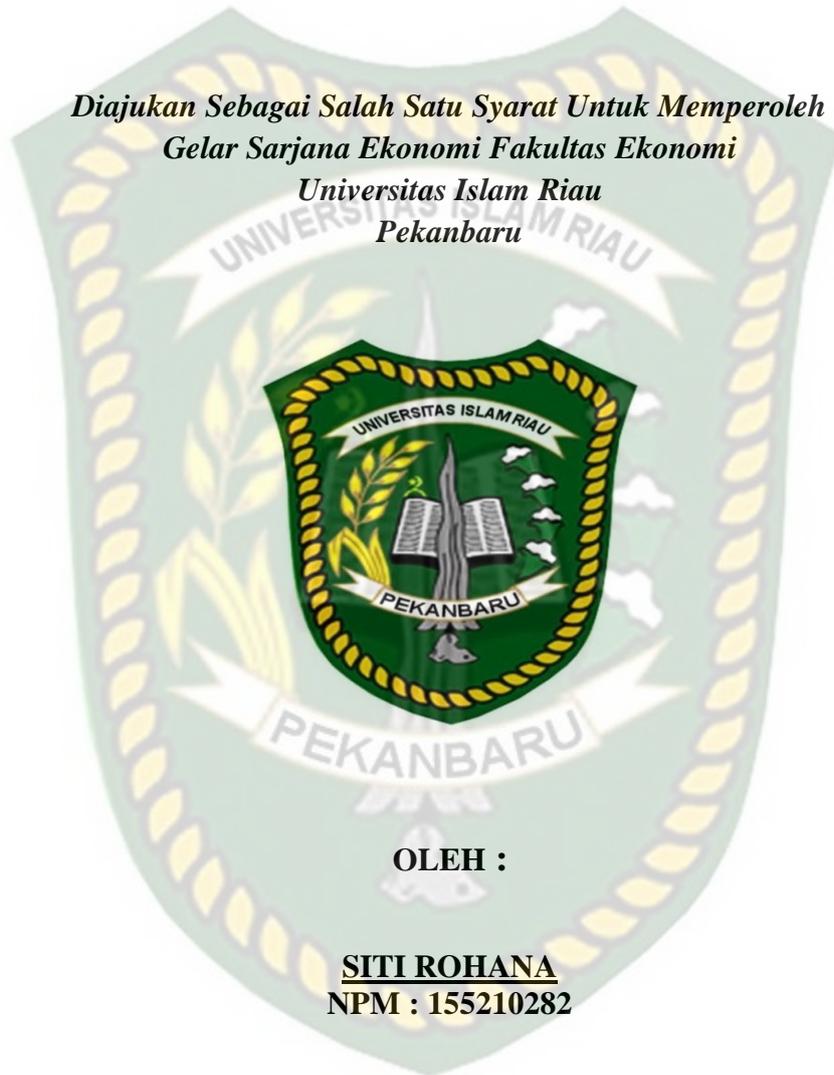


SKRIPSI

**ANALISIS KREDIT BERMASALAH PADA KPRI PRIMA HUSADA
BANGKINANG**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau
Pekanbaru*



OLEH :

SITI ROHANA
NPM : 155210282

**PRODI MANAJEMEN S-1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI**

Alamat: JalanKaharudinNasutionon No. 113 PerhentianMarpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax. (0761) 7674834 Pekanbaru-28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Rohana
NPM : 155210282
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen S1
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
JUDUL : Analisis Kredit Bermasalah Pada Kpri Prima Husada
Bangkinang

Disahkan Oleh :

Pembimbing I

(Dr. Hamdi Agustin, SE., MM)

Pembimbing II

(Dr. Raja Ria Yusnita, SE., ME)

Mengetahui :

DEKAN

(Drs. H. Abrar, M.Si., Ak.CA)

KETUA PRODI MANAJEMEN

(Azmansyah, SE., M.Econ)



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI**

Alamat: JalanKaharudinNasutionon No. 113 PerhentianMarpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax. (0761) 7674834 Pekanbaru-28284

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Siti Rohana
NPM : 155210282
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen S1
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
JudulPenelitian : Analisis Kredit Bermasalah Pada Kpri Prima Husada
Bangkinang

Disetujui Oleh:

Tim Penguji :

1. Dr. Dra. Hj. Eka Nuraini R., M. Si
2. Azmansyah, SE., M. Econ
3. Restu Hayati, SE., M. Si

Mengetahui :

Pembimbing I

(Dr. Hamdi Agustin, SE., MM)

Pembimbing II

(Dr. Raja Ria Yusnita, SE., ME)

Ketua Program Manajemen

(Azmansyah, SE., M.Econ)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: JalanKaharudinNasutionon No. 113 PerhentianMarpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax. (0761) 7674834 Pekanbaru-28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Siti Rohana
NPM : 155210282
Program Studi : Manajemen S1
Sponsor : Dr. Hamdi Agustin, SE., MM
Co Sponsor : Dr. Raja Ria Yusnita, SE., ME
Judul : Analisis Kredit Bermasalah Pada Kpri Prima Husada
Bangkinang

Dengan Perincian Bimbingan Skripsi Sebagai Berikut :

Tanggal	Catatan		Berita Acara	Paraf	
	Sponsor	Co Sponsor		Sponsor	Co Sponsor
03 - 12 - 2018	X		- Coba diganti variabelnya - Masukan data di latar belakang		
06 - 12 - 2018	X		- Acc Seminar Proposal		
06 - 03 - 2019		X	- Tambahkan jurnal dan penelitian terdahulu		
08 - 04 - 2019		X	- Teknik penulisan - Operasional Variabel - Kerangka pikiran		
11 - 04 - 2019		X	- Acc Seminar Proposal		
08-10-2019	X		- Ditambahkan Pembahasan - Perbaiki Data		
15-10-2019	X		- Acc ujian Seminal Hasil		

08 - 11 - 2019	X	- Teknik Penulisan - Abstrak Bahasa Inggris			<i>F</i>
03 - 12 - 2019	X	- Operasional Variabel			<i>F</i>
06 - 12 - 2019	X	- Acc ujian seminar hasil			<i>F.</i>



Pekanbaru, 20 Desember 2019

Pembantu Dekan I

Firdaus

Dr. Firdaus AR,SE.,M.Si.,Ak.,CA

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 3377/Kpts/FE-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi/oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
- a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
- b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
- c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
- d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

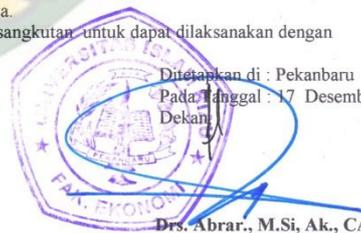
N a m a : Siti Rohana
 N P M : 155210282
 Program Studi : Manajemen S1
 Judul skripsi : Analisis Kredit Bermasalah Pada KPRI Prima Husada Bangkinang

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Raja Ria Yusnita, SE., ME	Assisten Ahli, C/b	Materi	Ketua
2	Abd Razak Jer, SE., M.Si	Lektor, C/c	Sistematika	Sekretaris
3	Dr. Dra. Hj. Eka Nuraini R, M.Si	Lektor Kepala, D/a	Methodologi	Anggota
4	Azmansyah, SE., M.Econ	Lektor, C/c	Penyajian	Anggota
5	Syaefulloh, SE., M.Si	Assisten Ahli, C/b	Bahasa	Anggota
6			-	Saksi I
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada tanggal : 17 Desember 2019
 Dekan



Drs. Abrar., M.Si, Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

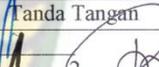
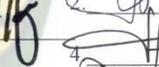
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Siti Rohana
NPM : 155210282
Judul Proposal : Analisis Kredit Bermasalah Pada KPRI Rima Husada
Bangkinang
Pembimbing : 1. Dr. Hamdi Austin, SE., MM
2. Raja Ria Yusnita, SE., ME
Hari/Tanggal Seminar : Kamis / 11 Juli 2019

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

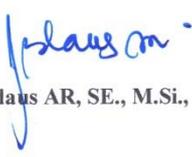
1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : ~~Perlu~~ tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

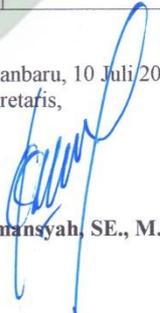
No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Hamdi Agustin, SE., MM		1. 
2.	Dr. Dra. Hj. Eka Nuraini R, M.Si		2. 
3.	Restu Hayati, SE., M.Si		3. 
4.	Yul Efnita, SE., MM		4. 
5.	Dr. Eva Sundari, SE.,MM.,CRBC		5. 
6.			6. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
A.n. Dekan Bidang Akademis,


Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA.

Pekanbaru, 10 Juli 2019
Sekretaris,


Azmansyah, SE., M.Econ.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1205/Kpts/FE-UIR/2018
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SI
Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang: 1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Manajemen tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga Mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang Akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut

Mengingat: 1. Surat Mendikbud RI:
 a. Nomor: 0880/U/1997 c.Nomor: 0378/U/1986
 b. Nomor: 0213/0/1987 d.Nomor: 0387/U/1987
 2. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 3. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
 b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 5. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara - saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1.	Dr. Hamdi Agustin, SE., MM	Lektor Kepala, D/a	Pembimbing I
2	Raja Ria Yusnita, SE., ME	Assisten Ahli, C/b	Pembimbing II

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:
 N a m a : Siti Rohana
 N P M : 155210282
 Jusan/Jenjang Pendd. : Manajemen / SI
 Judul Skripsi : Pengaruh kredit bermasalah dan perputaran kas terhadap likuiditas pada KPRI Prima Husada Bangkinang.
3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal.
5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.
- Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
 Pada Tanggal: 28 November 2018
 Dekan,

Drs. Abrar, M.Si, Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada:

1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Islam Riau maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan disebutkan nama pengarah dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Pekanbaru, 12 DESEMBER 2010

Saya yang membuat pernyataan



SITI ROHANA

**ANALISIS KREDIT BERMASALAH PADA KPRI PRIMA HUSADA
BANGKINANG**

Oleh :Siti Rohana

155210282

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kredit bermasalah pada KPRI Prima Husada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengetahui cara penanganan kredit bermasalah dengan cara reschedulling, surat teguran dan memberikan SP 1 dalam tiga bulan, dan Faktor – faktor yang menyebabkan kredit bermasalah,ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal anggota yang tidak jujur dan jaminan dalam meminjam hanya menggunakan sertifikat dan Sk PNS, sedangkan dari faktor eksternal adalah anggota yang meminjam diluar KPRI Prima Husada.

Kata Kunci : Kredit Bermasalah, Koperasi

**ANALISIS KREDIT BERMASALAH PADA KPRI PRIMA HUSADA
BANGKINANG**

Oleh :Siti Rohana

155210282

ABSTRAK

The purpose of this study was to determine non-performing loans in KPRI Prima Husada. The method used is descriptive method. Data collection techniques using interview, observation and documentation. The results of this study know how to handle non-performing loans, there are two factors, namely internal and external factors, where internal factors are dishonest members and guarantees in borrowing only uses certificates, Sk PNS, while from external factors are members who borrow outside KPRI Prima Husada.

Keywords : Non Performing Loan, and Cooperatives

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya yang tidak terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Analisis Kredit Bermasalah pada KPRI Prima Husada Bangkinang** “.

Sholawat beriring salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada umat dan para pengikutnya diakhir zaman.

Penulis skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana pendidikan SI pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Merupakan sebuah kebanggaan telah menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang di inginkan, dengan selesainya sebuah anugrah untuk mendapatkan predikat sarjana ini tidak lepas dari dukungan orang-orang yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih yang sedalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Drs. Abrar, M. Si. AK, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang memberikan izin kepada penulis sehingga terlaksana skripsi ini.
3. Bapak Firdaus AR,SE., M. Si.CA, selaku wakil Dekan I, Ibu Dr.Eva Sundari, SE.,MM.,CRBC, selaku Wakil Dekan II, Bapak Drs. Abrar, Msi., Ak, CA selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Azmansyah, SE., M.Econ dan Ibu Yulefnita, SE., MM, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Universitas Islam Riau.

5. Bapak Dr. Hamdi Agustin, SE., MM dan Ibuk Dr. Raja Ria Yusnita, SE., ME, selaku pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan yang terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen pengajar dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu di bidangnya.
7. Pak de dan seluruh pegawai serta karyawan yang ada dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
8. Kepada orang tua penulis, Bapak tersayang Endang (Alm), dan Ibuk tercinta Zahara yang tidak henti-hentinya memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang terhebat untuk penulis.
9. Abang Rijal, kakak Basraini, abang Masrianto, abang Syamsul Azwar, kakak Heny Pramayanti, kakak Roma, abang Safrinaldi, dan semua keluarga yang berada di Tanjung Alai yang tidak henti-hentinya memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis, terima kasih kalian semua menjadi yang terbaik untuk penulis.
10. Kepada sahabat tersayang sekaligus keluarga kedua yaitu Soleha, Marleni Rahayu, Wahyu Solihatin, Sri Zulaika. Firman Hidayat, dan Destia Sari Fatima, yang selalu ada di setiap keadaan apapun, selalu support dalam menjalankan skripsi ini dan terima kasih sudah menjadi keluarga kedua untuk penulis.

11. Kepada Roy Noris, yang selalu memberi semangat, yang selalu ada. Dan memberikan dukungan, motivasi supaya cepat wisuda terima kasih selalu ada buat penulis.
12. Kepada teman-teman Manajemen lokal A, semoga cepat menyusul dan tetap semangat dalam menyelesaikan skripsinya.
13. Kepada teman-teman Manajemen Angkatan 2015, selamat bagi yang sudah wisuda dan yang belum wisuda tetap semangat jalani dengan penuh keyakinan.

Akhir kata penulis banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu, dan penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bahan masukan bagi dunia pendidikan.

Pekanbaru, 26 Desember 2019

SITI ROHANA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	9
2.1 Koperasi Pegawai Republik Indonesia	9
2.1.1 Pengertian KPRI	9
2.1.2 Tujuan KPRI.....	13
2.1.3 Prinsip-prinsip KPRI.....	14
2.1.4 Karakteristik KPRI.....	14
2.2 Kredit	15
2.2.1 Pengertian Kredit	15
2.2.2 Fungsi-fungsi Kredit	17
2.2.3 Unsur-unsur Kredit	17
2.2.4 Jenis-jenis Kredit.....	18
2.2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit	21

2.2.6	Prosedur Pemberian Kredit	22
2.3	Kredit Bermasalah	24
2.3.1	Pengertian Kredit Bermasalah	24
2.3.2	Kriteria Kredit Bermasalah	26
2.3.3	Faktor Penyebab Kredit Bermasalah	27
2.3.4	Penyelesaian Kredit Bermasalah	28
2.3.5	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah	30
2.4	Penelitian Terdahulu	32
2.5	Kerangka Pemikiran	33
2.6	Hipotesis Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN		35
3.1	Objek / Lokasi Penelitian.....	35
3.2	Operasional Variabel.....	35
3.3	Populasi dan Sampel	36
3.3.1	Populasi.....	36
3.3.2	Sampel.....	36
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	36
3.4.1	Jenis Data.....	36
3.4.2	Sumber Data	37
3.5	Teknik Pengumpulan Data	37
3.6	Teknik Analisis Data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....		39
4.1	Sejarah Umum Terbentuknya KPRI Prima Husada.....	39
4.2	Wewenang dan Tugas	43
4.3	Visi dan Misi KPRI Prima Husada.....	47
4.3.1	Visi KPRI Prima Husada	47

4.3.2 Misi KPRI Prima Husada.....	47
-----------------------------------	----

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
---	-----------

5.1 Analisis Deskriptif Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	48
---	----

5.1.1 Penanganan Kredit Bermasalah	48
--	----

5.2 Analisis Deskriptif Penyebab Kredit Bermasalah.....	51
---	----

5.2.1 Faktor Penyebab.....	51
----------------------------	----

5.3 Analisis Deskriptif Prosedur Pemberian Kredit.....	56
--	----

5.3.1 Permohonan Pemberian Kredit.....	57
--	----

5.3.2 Penilaian Kredit.....	58
-----------------------------	----

5.4 Pembahasan.....	60
----------------------------	-----------

5.4.1 Penyelesaian Kredit Bermasalah	61
--	----

5.4.2 Penyebab Kredit Bermasalah	63
--	----

5.4.3 Prosedur pemberian Kredit	63
---------------------------------------	----

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
---	-----------

6.1 Kesimpulan	65
----------------------	----

6.2 Saran.....	66
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	69
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kolektabilitas Kredit Bermasalah	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian	35
Tabel 4.1 Nama-nama Koperasi Dinas Kesehatan	40
Tabel 5.2 Kriteria Kolektabilitas Kredit pada KPRI Prima Husada.....	53
Tabel 5.3 Laporan Data Nasabah Kredit Bermasalah	54
Tabel 5.4 Hasil NPL pada KPRI Prima Husada	54
Tabel 5.5 Data Range Account	55

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 33

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPRI Prima Husada



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan Undang – Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan sebagaimana tertuang didalam Anggaran Rumah Tangga USP KPRI Prima Husada bahwa unit usaha ini harus dipimpin oleh seorang Manager (Kepala Unit Simpan Pinjam) yang pada periode kepengurusan tetap dilaksanakan oleh pengurus, dengan catatan kepengurusan harus menunjuk salah seorang pengurus sebagai pengelola, dengan pengelolaan pembukuan keuangan dan usaha yang terpisah dari koperasi induknya.

KPRI Prima Husada pada unit simpan pinjam hadir dengan kemudahan dalam prosedur pengajuan kredit dan suku bunga yang rendah. Meski dengan prosedur yang pengajuan kredit dan suku bunga yang rendah masih belum menjamin akan ketepatan anggota dalam menyelesaikan pinjamannya. Masih ada beberapa anggota yang tidak mampu untuk membayar tagihan hutangnya. Hal ini menyebabkan usaha mengalami kredit bermasalah. Dimana para pihak penyalur kredit merasa kesulitan untuk menagih kredit yang disalurkan kepada para debitur tidak mampu melunasi kreditnya pada waktu yang sudah ditentukan. Kredit bermasalah

menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan rugi yang potensial. Adanya kredit bermasalah akan mengurangi jumlah persediaan kas sehingga jumlah kas yang berada di koperasi akan sedikit, karena jumlah arus kas yang seharusnya diterima, yang berasal dari kredit yang diberikan dan / atau surat-surat berharga yang dimiliki (*financial claims*), misalnya obligasi, tidak dibayar secara penuh.

Koperasi pegawai adalah salah satu jenis koperasi yang digolongkan berdasarkan anggota. Koperasi pegawai memiliki berbagai jenis kegiatan usaha yang dikelolanya, salah satunya koperasi memberikan kredit, dengan memberikan kredit koperasi dapat memperoleh bunga. Semakin banyak kredit yang dilakukan, maka pendapatan bunga yang diperoleh koperasi semakin besar. Akan tetapi, semakin besar pula kemungkinan resiko yang dihadapi. Banyak resiko yang timbul karena pemberian kredit misalnya, tidak terbayarnya seluruh atau sebagian kredit serta penundaan pembayaran yang mengakibatkan penumpukan pinjaman macet yang dapat menghambat perputaran arus kas koperasi dan menyebabkan kredit bermasalah.

Pendapatan KPRI bukan hanya dari simpan pinjam tapi juga ada kegiatan lain seperti usaha toko waserba, usaha photo copy dan ATK, usaha penyewaan tenda, usaha penginapan/mess, usaha aula, aula mini dan hall tenis meja, dan usaha tanah kamplingan. Dalam rangka pengembangan usaha guna untuk meningkatkan pendapatan koperasi.

Jumlah anggota KPRI Prima Husada dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan. Pada tahun buku 2017 jumlah anggota KPRI Prima Husada sesuai yang tercantum dalam buku keanggotaan KPRI Prima Husada berjumlah 1.264 orang.

Pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada kegiatan simpan pinjam (Sitio dan Tamba, 2001). Penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dilaksanakan dalam bentuk atau wadah operasi simpan pinjam anggota untuk tetap dapat berproduksi. Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri, koperasi melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin untuk mengurangi adanya resiko kredit macet. Kredit macet merupakan kredit yang pengembalian pokok dan pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari (Bank Indonesia).

Yang termasuk kedalam Kredit Lancar suatu Kredit yang dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu,, Kredit yang Diragukan kredit yang dapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 60 hari, Kredit Kurang Lancar yang dapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 30 hari sedangkan Kredit Macet Kredit yang dapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari.

Sebagai penggambaran KPRI Bangkinang melalui laporan kredit memperlihatkan perkembangan penyaluran kredit berdasarkan kategori :

Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1.1

Kolektabilitas kredit bermasalah pada KPRI Prima Husada

Bangkinang tahun 2015-2017

(dalam bentuk rupiah)

Tahun	Kolektabilitas	Nominal	Persentase
2015	Kredit Lancar	Rp. 2.214.031.680	49 %
	Kredit Kurang Lancar	Rp. 430.889.300	15 %
	Kredit Diragukan	Rp. 165.759.724	6 %
	Kredit Macet	Rp. 1.659.521.278	60 %
2016	Kredit Lancar	Rp. 1.426.626.110	29 %
	Kredit Kurang Lancar	Rp. 897.686.214	34 %
	Kredit Diragukan	Rp. 447.953.783	17 %
	Kredit Macet	Rp. 2.091.833.802	80 %
2017	Kredit Lancar	Rp. 1.324.459.110	22 %
	Kredit Kurang Lancar	Rp. 912.937.499	36 %
	Kredit Diragukan	Rp. 283.897.852	11 %
	Kredit Macet	Rp. 3.278.096.682	132 %

(Sumber : Kolektabilitas KPRI Kecamatan Bangkinang Tahun 2015-2017)

Berdasarkan pada data tabel 1 diatas dapat dijelaskan persentase kredit macet dari tahun ke tahun masih tergolong meningkat yaitu pada tahun 2015 sebanyak 60 %, 2016 persentase kredit macet naik berjumlah 80 %, dan tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 132 %. Sedangkan untuk kolektabilitas koperasi dalam bentuk rupiah diketahui bahwa kredit macet pada tahun 2015 yaitu sebesar 1.659.521.278, tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 2.091.833.802 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan lagi sebesar 3.278.096.682. Dari data tabel di atas kredit macet masih tergolong meningkat di setiap tahunnya dan berakibat pada NPL perbankannya.

Dari keseluruhan jumlah kredit macet, dapat dikatakan bahwa beberapa nasabah mengalami masalah pengembalian kredit. Pada tabel 1 di atas tersebut dapat dilihat bahwa kredit bermasalah (NPL) yang di timbulkan dari besarnya kredit macet pada setiap tahunnya.

Kredit yang diberikan tanpa didahului oleh analisa kredit yang profesional dapat diragukan mutunya. Tujuan analisa kredit adalah menilai mutu permintaan kredit baru yang diajukan oleh calon debitur ataupun permintaan tambahan kredit terhadap kredit yang sudah pernah diberikan yang diajukan oleh debitur lama. Penilaian mutu pemberian kredit dapat memperkecil resiko adanya kredit bermasalah.

Pemberian kredit kepada anggota mengandung resiko yaitu kemungkinan penerima kredit tidak mampu melunasi kredit tepat pada

waktunya atau bahkan gagal bayar sama sekali. Penyebab kredit bermasalah di KPRI Bangkinang adanya pemohon pinjaman yang nyata-nyata berwatak buruk atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**ANALISIS KREDIT BERMASALAH PADA KPRI PRIMA HUSADA BANGKINANG**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara penanganan kredit bermasalah pada KPRI Prima Husada Bangkinang?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan kredit bermasalah pada KPRI Prima Husada Bangkinang ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara penanganan kredit bermasalah pada KPRI Prima Husada Bangkinang
2. Untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan tinggi kredit macet pada KPRI Prima Husada Bangkinang

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi KPRI Prima Husada Bangkinang

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang terutama yang berkaitan dengan kredit bermasalah.

b. Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang terutama yang berkaitan dengan kredit bermasalah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyebab terjadinya kredit bermasalah, sehingga diharapkan masyarakat dapat menggunakan kredit yang diberikan sesuai dengan keperluan yang telah direncanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai hal-hal yang dibahas dalam penulisan ini, maka sistematika penulisannya terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang secara rinci adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menerapkan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAHAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini menyajikan tinjauan dan landasan teoritis yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas dan kemudian digunakan sebagai acuan dan juga penalaran dari analisis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang terdiri dari lokasi/objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik analisis data yang akan digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan deskripsi objek penelitian secara mendetail yang terdiri dari profil perusahaan yang akan di jadikan sampel penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data, analisis dan pembahasan yang meliputi

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari penutup, yang berisi kesimpulan dan saran, serta dibagian akhir daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Koperasi Pegawai Republik Indonesia

2.1.1 Pengertian Koperasi Pegawai Republik Indonesia

Di Indonesia memiliki tiga sektor kekuatan ekonomi untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam tatanan kehidupan perekonomian. Ketiga sektor tersebut adalah sektor Negara, sektor Swasta, dan sektor Koperasi. Dalam kehidupan perekonomian, disadari gerakan koperasi mempunyai peranan yang sangat besar. Sejalan dengan itu koperasi merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi anggota dan masyarakat sehingga dirasakan cocok untuk dijadikan sarana bagi bangsa Indonesia yang sebagian besar masyarakat ekonominya lemah.

Menurut Dr. Mohammad Hatta "*The Movement in Indonesia*" beliau mengemukakan bahwa Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian merupakan landasan hukum terbaru bagi perkoperasian di Indonesia. Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian nasional yang merupakan suatu badan usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi bangsa Indonesia yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi merupakan badan usaha. Sebagai badan usaha tentu saja koperasi tidak jauh berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya, yang bertujuan memperoleh laba. Koperasi dapat mempertahankan eksistensi usaha dan meningkatkan kemampuan usahanya yang pada akhirnya juga berimplikasi pada pencapaian tujuan utama koperasi, yakni dapat memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lembaga Keuangan bank dan non bank sama-sama mempunyai peran sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Salah satu lembaga keuangan non bank yang memiliki peran dalam pemberian fasilitas kredit adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Menurut Sadono Sukirno (2003:188), perusahaan koperasi adalah perusahaan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk

melindungi kepentingan para anggotanya. Menurut Soni Sumarsono (2003:5), menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya dengan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pengertian Koperasi menurut Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan koperasi adalah bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud dalam Undang – Undang Dasar 1945.

KPRI koperasi yang didirikan oleh pegawai negeri serta dikelola untuk kepentingan pegawai negeri. Jadi, anggota KPRI adalah juga orang-orang yang mempunyai wilayah kerja kecamatan atau berada dalam lembaga pemerintahan atau di sekolah-sekolah atau di kecamatan-kecamatan. Pendiri dan anggota KPRI adalah orang-orang yang mempunyai profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi pemerintah. Oleh karena KPRI sebagai badan usaha yang beranggotakan para anggota PNS, maka keberhasilan usahanya sangat tergantung pada kemauan anggota untuk memanfaatkan jasa yang telah di sediakan oleh koperasi.

Pada saat ini perkembangan koperasi banyak memiliki tantangan, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Tantangan koperasi yang berasal dari luar antara lain munculnya badan usaha yang didirikan oleh pihak lain yang memiliki tujuan yang hampir sama dengan koperasi, misalnya adanya pertokoan maupun penyedia jasa lain yang menyediakan berbagai kebutuhan seseorang. Munculnya badan usaha milik swasta merupakan ancaman yang serius bagi keberadaan koperasi. Dalam hal ini koperasi perlu mengembangkan dan meningkatkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan anggota agar tujuan utama koperasi yaitu kesejahteraan anggota dapat tercapai. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan usaha koperasi inilah peranan anggota sangat penting, karena perkembangan koperasi sangat tergantung dari partisipasi anggotanya.

Pada kegiatan di KPRI Prima Husada Bangkinang dalam penanganan transaksi yang berupa simpan pinjam terlebih dahulu calon peminjam uang atau yang ingin menyimpan uang diwajibkan menjadi anggota koperasi terlebih dahulu dimana calon tersebut dapat mendaftarkan pada pihak administrasi dengan hanya memberikan identitas yang berupa nama kepada pihak administrasi. Setelah calon pendaftar tersebut telah memenuhi syarat dan menjadi anggota koperasi maka anggota tersebut dapat melakukan penyimpanan ataupun peminjaman uang berdasarkan ketentuan pada KPRI Prima Husada Bangkinang yang nantinya pihak administrasi akan mencatat transaksi tersebut pada buku simpan pinjam koperasi. Pada proses simpanan atau pembayaran angsuran anggota nantinya untuk proses

pembayaran akan dilakukan oleh pihak bendahara yang menangani penggajian dimana sebelumnya pihak administrasi akan membuat daftar anggota koperasi dan laporan peminjaman anggota yang akan diberikan pada pihak bendahara dengan pemotongan gaji sesuai jumlah pembayaran simpanan maupun pembayaran angsuran.

KPRI berperan untuk simpan pinjam baik pegawai negeri sipil (PNS), maupun untuk masyarakat umum. Wilayah kerja KPRI Prima Husada Bangkinang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kampar. Keanggotaan KPRI Prima Husada Bangkinang merupakan seluruh tenaga kesehatan yang keberadaannya tersenar diseluruh wilayah Kabupaten Kampar pada unit-unit kerja sebagai berikut :

1. Dinas Bangkinang
2. RSUD Bangkinang
3. Puskesmas Se- Kabupaten Kampar

2.1.2 Tujuan Koperasi

Tujuan Dibentuknya Koperasi adalah sebagai berikut :

1. Memajukan kesejahteraan anggota, karyawan, dan kesejahteraan masyarakat umumnya.
2. Ikut membantu tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

2.1.3 Prinsip – Prinsip Koperasi

Prinsip – prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat.

Prinsip – prinsip tersebut terdiri dari :

1. Kemandirian
2. Keanggotaan bersifat terbuka
3. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, dan pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

2.1.4 Karakteristik Koperasi

Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Oleh karena itu:

1. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama
2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu anggota-

anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, bertanggung jawab, sosial, dan kepentingan terhadap orang lain

3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan oleh para anggotanya
4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggotanya.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, pertukaran dengan cara barter bergeser dengan perkembangan peranan uang, yaitu menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang disebut kredit. Karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung, yaitu yang kelebihan uang disebut pemberian kredit (kreditur) dan yang membutuhkan kredit disebut penerima kredit (debitur) yang masing-masing saling mempercayai kesanggupan membayar sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani Sinungan (1992:210) yaitu *credere* yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*), oleh karena itu dasar

dari kredit adalah kepercayaan, seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.

Sedangkan di negara kita pengertian kredit yang lebih baku untuk menunjang proses kegiatan Operasional perbankan, yaitu dalam Undang – undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – undang No. 7 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut pendapat Hasibuan Malayu (2009:87) Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Kasmir (2015 : 82) Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kredit adalah

dapat berupa uang atau tagihan dan kemudian adanya kesepakatan antara kreditor dengan debitur yang mencakup hak dan kewajiban masing – masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.

2.2.2 Fungsi – fungsi Kredit

Menurut Muchdarsyah Sinungan(1993 : 5) Adapun fungsi-fungsi kredit didalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dalam garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Kredit dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal atau uang
2. Kredit meningkatkan daya guna suatu barang
3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
4. Menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
5. Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi
6. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional

2.2.3 Unsur – unsur Kredit

Menurut Kasmir(2015 : 84) Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (Koperasi) bahwa kredit yang di berikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

2. Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antar si pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan.

3. Jangka Waktu

Dalam kredit yang di berikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah di sepakati antara calon debitur dengan pihak koperasi.

4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat di akibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang di akibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang di akibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

5. Balas Jasa

Akibat pemberian dari fasilitas kredit koperasi tentu juga mengharapkan suatu imbalan atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang tidak kenal dengan nama bunga bagi koperasi prinsip konvensional.

2.2.4 Jenis – jenis Kredit

Menurut Kasmir (2010:76) kredit dibedakan atas beberapa jenis, diantaranya:

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit Investasi

Kredit ini digunakan untuk keperluan perluasan, usaha kredit ini biasanya digunakan untuk tujuan jangka panjang.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit ini digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya, kredit ini mempunyai tujuan jangka pendek.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi pribadi. Contohnya kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan. Biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu pengembalian kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu pengembalian berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang dalam pengembaliannya paling panjang yaitu di atas 3 sampai 5 tahun.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan Jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan dapat berupa barang berwujud, tidak berwujud atau jaminan orang. Jadi setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan menilai prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit Pertanian

Merupakan kredit untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit Peternakan

Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang misalnya peternakan kambing dan sapi.

c. Kredit Industri

Yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan usaha untuk industri kecil, menengah, atau besar.

2.2.5 Prinsip – prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2007:104) terdapat lima prinsip (5c) yang harus diperhatikan dalam melakukan penelaahan yang mendalam terhadap kondisi calon debitur meliputi penganalisaan terhadap *character, capacity, capital, collateral and condition of economic*.

1. *Character*

Tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat-sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelolah bisnis serta kemampuan nya mencari laba. Sehingga pada akhirnya terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Biasanya koperasi tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha itu secara keseluruhan atau 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan

permohonan kredit harus menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang di miliki nasabah terhadap usaha yang akan di biyai oleh koperasi.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah kepada koperasi baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga dinilai dengan diteliti ke sahannya, sehingga agar tidak terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

menganalisis kondisi ekonomi makro yang meliputi kondisi politik, sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat tertentu, termasuk peraturan pemerintah setempat.

2.2.6Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2015) sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan – tahapan penilaian mulai dari pengajuan permohonan kredit dan dokumen – dokumen yang diperlukan. Tahapan – tahapan dalam memberikan kredit ini kita kenal dengan nama prosedur pemberian kredit.

Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam

penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak koperasi dapat meminta kembali ke anggota atau bahkan langsung ditolak.

Dalam koperasi ada beberapa prosedur dalam pemberian kredit kepada anggota, antara lain yaitu :

1. Permohonan Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit pada KPRI Prima Husada dimulai dengan adanya permohonan kredit dari calon debitur. Calon debitur dalam mengajukan permohonan kredit harus memenuhi syarat yang ada. Syarat – syarat nya adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh satuan kerja perangkat daerah
- b. Anggota KPRI
- c. Surat keterangan penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara gaji
- d. Surat kuasa pemotongan gaji
- e. Slip gaji bulan terakhir

2. Penilaian Kredit

Dalam hal ini penilaian dari KPRI Prima Husada dalam melakukan pinjaman kepada debitur koperasi melakukan penilaian dengan menggunakan teknik analisis 5C, dimana antara lain yaitu :

- a. Calon debitur adalah berwatak (*character*) baik. Menyangkut kepribadian, sifat / watak, kejujuran calon debitur dalam memberikan keyakinan bahwa benar – benar percaya.

- b. Calon debitur berkemampuan (*capacity*) untuk membayar angsuran sesuai dengan perjanjian kredit.
- c. Calon debitur memiliki modal (*capital*) atau sumber – sumber pembiayaan lain untuk memenuhi syarat.
- d. Calon debitur berada dalam atau memiliki masa depan atau pribadi atau usaha yang cerah (*condition*). Koperasi tidak memfokuskan bahwa anggotanya menggunakan pinjaman untuk usaha. Jadi bisa menyesuaikan tujuan calon debitur dalam mempergunakan pinjaman tersebut.
- e. Calon debitur memiliki jaminan atau agunan (*collateral*). KPRI Prima Husada sampai saat ini tidak menerapkan jaminan atau agunan berupa barang, hanya menggunakan slip gaji bagi yang meminjam dibawah Rp.50.000.000 tetapi jika diatas Rp.50.000.000 baru menggunakan jaminan atau agunan berupa sertifikat, BPKB motor / mobil.

2.3 Kredit Bermasalah

2.3.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Menurut Ismail(2010 : 224) Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada koperasi seperti yang telah di perjanjikan.

Adapun menurut Dahlan Siamat(2007 : 101) Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat

adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan(2009 : 115) kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur bersangkutan.

Menurut Ahira (2010) kredit macet adalah merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh lembaga pembiayaan, setiap lembaga pembiayaan yang memberikan layanan kredit tidak bisa menolak terjadinya masalah ini dan harus selalu siap menghadapinya.

Pengertian kredit bermasalah adalah keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya (Kuncoro dan Suhardjono,2009,462). Kredit bermasalah dapat diartikan suatu keadaan kredit dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya, atau telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan mampu dilunasi debitur.

Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Performing Loan yang mempunyai kelemahan yang apabila tidak diperbaiki dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya. Kredit – kredit jenis ini harus dimasukkan dalam kolektibilitas dalam perhatian khusus sesuai yang berlaku, kredit ini memerlukan perhatian khusus pihak manajemen untuk

segera menetapkan tindakan perbaikan agar tidak menjadi Non Performing Loan (NPL) pengertiannya menurut Siamat (2004) yaitu salah satu faktor penyebab runtuhnya kondisi suatu bank yaitu adanya NPL yang melebihi batas kewajaran yang ditetapkan oleh BI. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, *Non Performing Loan* (NPL) dibawah 5%.

Abdullah (2004:96-97) menjelaskan beberapa indikasi akan terjadinya kredit bermasalah ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menurunnya jumlah uang kas yang dimiliki debitur
- b. Semakin lama masa perputaran piutang
- c. Meningkatnya jumlah persediaan
- d. Meningkatnya rasio hutang
- e. Menurunnya jumlah penjualan
- f. Penjualan meningkat tetapi laba menurun.

2.3.2 Kriteria Kredit Bermasalah

Menurut Muchdarsyah Sinungan (2015 : 118) adalah :

- a. Kredit Lancar

Kredit yang perjalanannya lancar/memuaskan, artinya segala kewajiban bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik.

- b. Kredit Kurang Lancar

Kredit Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 30 hari.

- c. Kredit Diragukan

Dikatakan diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga melampaui 60 hari.

d. Kredit Macet

Dikatakan kredit macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari

2.3.3 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir (2015 : 120) hampir setiap bank mengalami kredit bermasalah alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Kemacetan suatu fasilitas kredit di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Dari Pihak Bank

Dalam hal ini pihak analisis bank kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang harus terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisis nya dilakukan secara tidak objektif.

2. Dari Pihak Nasabah

Kemacetan kredit yang di sebabkan oleh kesalahan nasabah di sebabkan oleh dua hal, yaitu :

- a. Adanya unsur kesengajaan, Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada pihak bank sehingga kredit yang di berikan dengan sendirinya macet.

- b. Adanya unsur tidak sengaja, Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu di karenakan usaha dibiayai terkena musibah misalnya banjir atau kebakaran.

2.3.4 Penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir (2010) penyelamatan kredit bermasalah dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

1. Rescheduling

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjang jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini, jangka waktu angsuran kreditnya di perpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali. Hal ini tentu sama saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. Surat Teguran

Sebelum petugas koperasi melakukan surat teguran, pihak koperasi mengadakan pendekatan dulu kepada debitur dengan berkomunikasi lewat telepon atau secara lisan jika bertemu diluar koperasi. Jika tahap ini debitur hanya merespon tanpa ada tindak lanjut untuk melunasi hutang

tersebut, maka tahap pemberian surat teguran kepada debitur menjadi tahap selanjutnya.

3. Dalam 3 Bulan Memberikan SP 1

Jika kedua tahap tersebut tidak dapat dipenuhi oleh debitur sesuai dengan perjanjian kredit, maka pihak koperasi melakukan tindakan dengan prosedur dalam 3 bulan memberikan SP 1,

- a. Pihak koperasi dalam 3 bulan akan memberikan surat peringatan I langsung kepada debitur, penjelasan yang disampaikan akibat atas keterlambatan tentang jumlah pokok angsuran, jumlah bunga pinjaman. Selain itu, surat tersebut tidak hanya ditujukan ke debitur yang terkait, namun berisi tembusan ke pihak : kepala kantor yang bersangkutan serta bendahara yang bersangkutan.
- b. Jika butir a tidak dipenuhi oleh debitur, pengurus koperasi akan menindaklanjuti debitur dengan memberikan surat peringatan yang ke II dengan isi surat tersebut tentang pembayaran yang harus dilunasi dengan tembusan yang sama yaitu kepala kantor yang berurusan, bendahara kantor yang berurusan untuk menyelesaikan pinjaman (diperpanjang atau dilunasi). Jika debitur tidak ada menunjukkan etiked untuk melunasi pinjaman tersebut.
- c. Jika surat peringatan ke II debitur tersebut tidak ada menunjukkan etiked untuk melunasi hutang tersebut. Pengurus koperasi memanggil dengan surat peringatan ke III yang ditujukan langsung pada debitur

dengan tembusan kepala kantor yang bersangkutan dan bendahara kantor yang bersangkutan.

- d. Pengurus koperasi mendatangi langsung debitur jika dengan surat ke III debitur tidak datang melunasi keseluruhannya, pengurus koperasi mendata kembali secara detail tentang keadaan debitur, mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan untuk keputusan akhir.

2.3.5 Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah

Kasus kredit macet ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekstern dan faktor intern dari koperasi itu sendiri. Faktor ekstern yang bisa mempengaruhi terjadinya kredit macet adalah kondisi ekonomi secara makro, sedangkan faktor intern yang dapat mengakibatkan timbulnya kredit macet adalah prosedur pemberian kredit yang tidak jelas dan lemahnya sistem pengawasan.

Dua faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal
 - a. Lemahnya aturan dalam prosedur pemberian kredit dilihat dari tahap penilaian, hanya dilakukan dengan wawancara kepada anggota, tanpa ada standar tertulis. Sehingga tidak ada dijadikan pedoman dalam tahap penilaian di prosedur pemberian kredit.
 - b. Kelemahan lain dalam persyaratan permohonan pinjaman kredit KPRI Prima Husada hanya menggunakan slip gaji bagi yang meminjam dibawah RP 50.000.000 tetapi jika meminjam diatas Rp.50.000.000

baru menggunakan jaminan atau agunan.seharusnya jaminan lain perlu dicantumkan untuk mengantisipasi biaya kerugian jika anggota tidak dapat melunasi kredit tersebut.

2. Faktor Eksternal

- a. Pinjaman tidak hanya dilakukan di KPRI Prima Husada saja tapi dikoperasi lainnya, sehingga terjadi tunggakan pembayaran. Koperasi tidak dapat mengetahui hal tersebut, sehingga koperasi kebingungan dan kesulitan dalam penagihan karena ternyata anggota memiliki hutang ditempat lain.
- b. Anggota yang meminjam dikoperasi lain tidak dapat membayar angsuran pinjaman setiap bulan dan mengakibatkan penunggakan, karena dari gaji anggota yang tidak mampu dalam membayar untuk membayar angsuran pinjaman didua tempat, sehingga terjadinya kredit bermasalah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Operasional Variabel	Kesimpulan
1	Saparida, Parijo, F.Y Khomas (2013)	Analisis Kredit Macet pada Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa Kota Pontianak.	Kredit Macet	Faktor penyebab kredit macet sebagian besar disebabkan dari pihak koperasi dengan tidak melakukan penilaian 5 C.
2	Rini Saputri (2015)	Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PD. BPR SARIMADU CABANG PEKANBARU	Kredit Bermasalah	Dampak dari kredit bermasalah pada BPR SARIMADU CABANG PEKANBARU adalah : 1. Adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan 2. Terganggunya kinerja pihak

				bank 3. Keuntungan bank berkurang.
3	I Nyoman Suarjaya (2015)	Analisis penyelesaian kredit macet pada koperasi pasar sriadi klungkung	Kredit Macet	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet pada koperasi adalah dengan <i>reschedulling</i> , <i>restructuring</i> (persyaratan kembali), penyitaan jaminan dan penghapusan kredit.

No	Nama Penelitian	Judul	Operasional Variabel	Kesimpulan
4	Komang Andri Suryani Kusuma, I Nyoman Gede Ustriyana, A.A.A Wulandira SDJ (2016)	Analisis Kredit Macet pada KPN Satya Bhakti Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana	Kredit macet	Kredit macet yang terjadi pada KPN Satya Bhakti Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal

2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam penanganan kredit bermasalah pada KPRI Prima Husada masih belum maksimal dengan baik dan benar , anggota masih banyak yang tidak jujur dan lalai dalam membayar angsuran.
2. Faktor yang menyebabkan kredit bermasalah pada KPRI Prima Husada disebabkan oleh koperasi itu sendiri yang masih belum maksimal dalam memberikan prosedur pemberian kredit, sehingga terjadinya anggota yang tidak jujur dan melakukan pinjaman diluar koperasi tersebut.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Objek/ Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini pada KPRI Prima Husada Bangkinang. Jalan Abdul Rachman Saleh, 28411, Kumantan, Bangkinang, Kabupaten Kampar.

3.2 Operasional Variabel Penelitian

Tabel 3.1
Operasional Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	skala
1	Penyelesaian kredit bermasalah adalah pengendalian kredit bermasalah dengan jalan <i>reschedulling</i>	1. Penanganan Kredit Bermasalah	2. <i>Reschedulling</i> (penjadwalan kembali)	Ordinal
			3. Surat Teguran	Ordinal
			4. Peringatan SP 1	Ordinal
2	Penyebab kredit macet adalah kredit yang tidak lancar yang sudah jatuh tempo namun belum dapat diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan. Muchardarsyah Sinungan (1993)	1. Faktor Penyebab	1. Faktor Internal	Ordinal
			2. Faktor Eksternal	Ordinal

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
3	Prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Kasmir (2015)	1. Permohonan Pemberian Kredit	1. Pengajuan Surat Permohonan	Ordinal
		2. Penilaian Kredit	3. Melakukan 5C :	Ordinal
			a. <i>Character</i> (kepribadian)	Ordinal
			b. <i>Capacity</i> (kemampuan)	Ordinal
			c. <i>Capital</i> (modal)	Ordinal
			d. <i>Collateral</i> (jaminan)	Ordinal
e. <i>Condition</i> (kondisi)	Ordinal			

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Yang menjadi objek penelitian ini adalah karyawan KPRI Prima Husada bagian pemberian kredit pada tahun 2015-2017 di KPRI Prima Husada Bangkinang.

3.3.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Ketua Koperasi 1 orang dan anggota koperasi 3 orang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang sumber data nya dari hasil penelitian lapangan. Sehingga penelitian ini di fokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan yang relevan dengan masalah yang di angkat.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan dengan cara mengadakan wawancara kepada pejabat KPRI Prima Husada Bangkinang. Kabupaten Kampar yang memiliki potensi di bidang kredit. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi dan mendapatkan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Merupakan penelitian ke perpustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan pustaka yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, observasi, mengkaji dokumen, dan arsip.

- a. Wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan tentang bagaimana cara menangani kredit bermasalah seperti ketua dan beberapa orang anggota KPRI Prima Husada Bangkinang
- b. Dokumentasi, pengumpulan data melalui dokumen-dokumen perusahaan yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan yang ditemukan.
- c. Observasi, proses pengambilan data dimana peneliti melihat situasi penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap aktivitas lapangan perusahaan.

3.6 Teknik Analisis Data

1. Menganalisis pelaksanaan prosedur pemberian kredit dan faktor penyebab kredit macet dan penanganan pada KPRI Prima Husada Bangkinang
2. Menghitung tingkat kredit bermasalah seperti kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet pada tahun 2015 sampai 2017 berdasarkan data kolektabilitas.
3. Menganalisis bagaimana penyelesaian kredit yang dilakukan oleh KPRI Prima Husada Bangkinang yaitu dengan melakukan : *rescheduling*, surat teguran, dan dalam 3 bulan SP 1

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Terbentuknya KPRI Prima Husada Bangkinang

Pada tahun 1979 (awal PELITA III era Orde Baru) sebagai perintis atau tunas atau embrio berdirinya KPRI Prima Husada adalah di bentuknya Koperasi SEHAT dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, namun karena kurang ditangani secara profesional akhirnya tidak berjalan seperti yang diharapkan atau tidak sesuai lagi dengan namanya. Sehingga pada bulan September 1981, Koperasi SEHAT secara resmi di nyatakan tidak beroperasi lagi dengan kekayaan sesuai yang tercantum dalam pembukuan hanya lebih kurang Rp. 30.000.-.

Dari pengalaman kejadian tersebut di atas beberapa orang karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar yang juga merupakan anggota Koperasi SEHAT pada bulan September 1981 mencoba untuk memprakarsai berdirinya koperasi pengganti.

Berkat adanya dukungan politis dari pemerintah daerah kabupaten kampar saat itu serta bimbingan dari pejabat dinas koperasi kabupaten kampar dan kepala dinas kesehatan kabupaten kampar, maka koperasi yang di inginkan dapat terbentuk.

Tabel 4.1

Nama Pemrakarsa berdirinya Koperasi Dinas Kesehatan

No	Nama	Instansi
1	Fuad Ali Zainal, BSc	Ka. Sub bagian Tata Usaha
2	Nursal Y.	Ka. Urusan Umum
3	Zamrius Mukhtar	Ka. Sub seksi samijaga
4	Hatiah Hasan	Ka. Urusan keuangan
5	Dalimi, M.	Staf urusan keuangan
6	Mansyur, M.	Staf RSUD Bangkinang

Para pemrakarsa tersebut di tugaskan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten kampar yang di jabat pada waktu itu oleh Dr. Leo Sutarman untuk merencanakan secara terperinci berdirinya suatu koperasi dilingkungan instansi kesehatan sebagai pengganti Koperasi SEHAT yang telah di nonaktifkan atau tidak beroperasi lagi.

Pada tanggal 22 September 1981 rencana yang telah di susun oleh tim pemrakarsa dibawa ke forum rapat seluruh karyawan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar yang waktu itu terdiri dari Dinas Kesehatan, RSUD Bangkinang dan Kandep Kesehatan serta puskesmas. Kemudian di putuskan untuk dibentuk secara resmi KPN Koperasi Kesehatan (KPN Kopkes) Kabupaten Kampar dengan susunan pengurus :

Ketua I : Fuad Ali Zainal BSc.

Ketua II : Mansyur, M.

Sekretaris I : Zamrius Mukhtar

Sekretaris II : Dalimi, M.

Bendahara : Nursal, Y.

Tetapi pada saat itu badan hukum KPN Kopkes belum di terbitkan, baru tanggal 17 Maret 1982 terbit badan hukum KPN Kopkes dengan nomor 906/BH/XIII. Sejak saat itu KPN Kopkes berjalan dari tahun ke tahun dengan baik. Kemudian seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kondisi kemasyarakatan dan pemerintahan di Indonesia, terjadi perubahan peraturan-peraturan di bidang perkoperasian, maka KPN Kopkes-pun menyesuaikan diri khususnya tentang anggaran dasar serta nomor badan hukumnya.

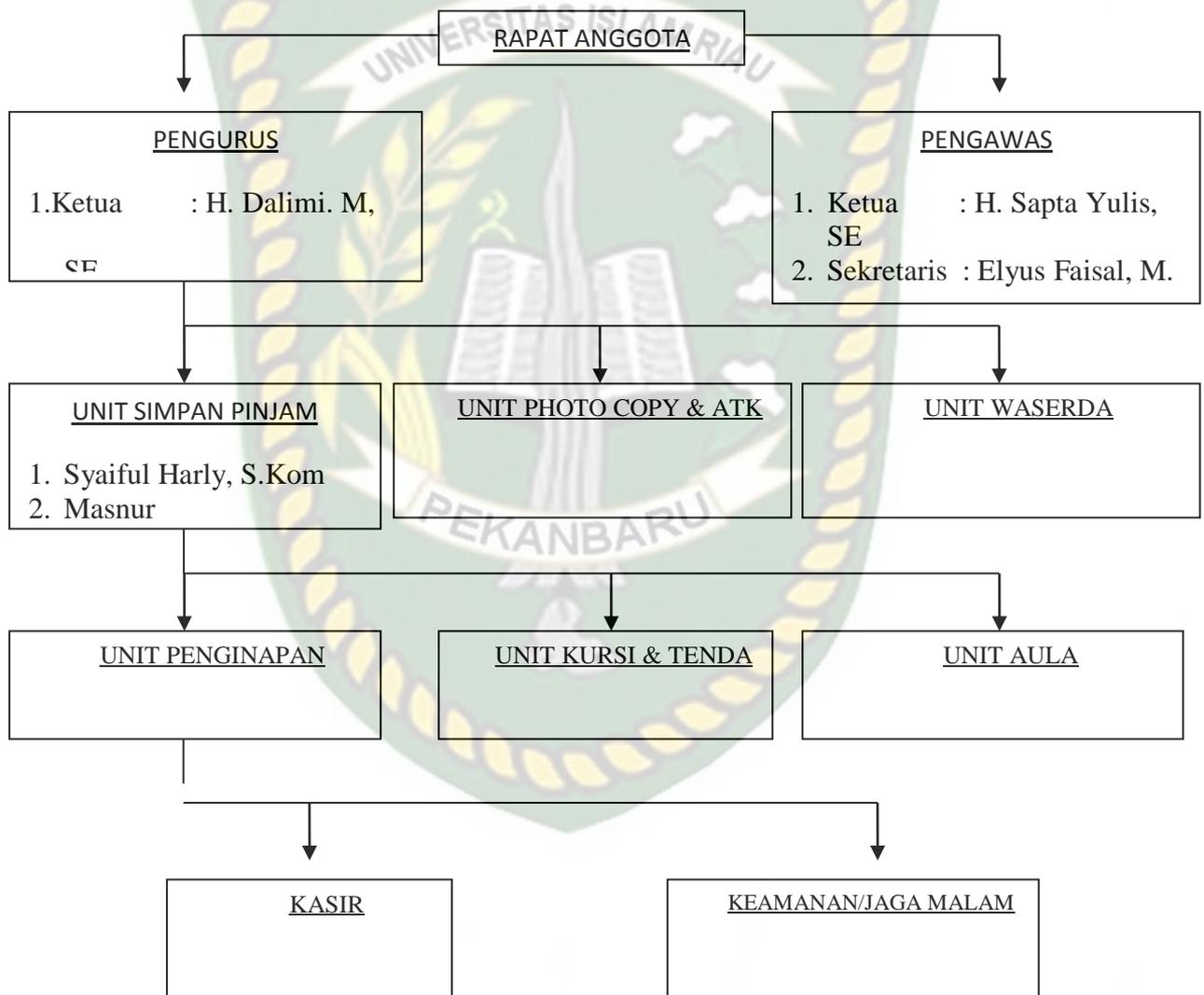
Berdasarkan rapat khusus yang waktunya di samakan dengan RAT tahun buku 1991 yaitu 25 Juli 1992 disahkan anggaran dasar yang baru kemudian diusulkan kepada pihak yang berwenang, maka KPN Kopkes resmi ditukar namanya dengan KPN Prima Husada Kabupaten Kampar dengan nomor badan hukum yaitu 906a/BH/XIII, tanggal 6 Juni 1992.

Setelah itu berdasarkan surat keputusan Menteri koperasi dan PPK nomor 142/BH/PAD/KWK.4/5.1/VI/1996, nama KPN Prima Husada diganti menjadi KPRI Prima Husada dengan badan hukum bernomor sama dengan SK Menteri tersebut, agar tidak bertentangan dengan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pada tahun 1999 untuk mengantisipasi perkembangan kebijaksanaan dibidang peroperasian, maka sesuai rapat pengurus dan disetujui oleh rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 1999 bidang usaha KPRI Prima Husada pada anggaran dasar sebelumnya hanya 3 (tiga) jenis dirubah menjadi 7 (

tujuh) jenis termasuk usaha di bidang pelayanan jasa kesehatan masyarakat, dengan badan hukum bernomor 171/PAD/KDK.4/I/VI/1999, tanggal 2 Juni 1999.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPRI Prima Husada



(Sumber: Kpri Prima Husada Bangkinang tahun 2015- 2017)

4.2 Wewenang dan Tugas

Deskripsi jabatan diperlukan untuk mengetahui tugas dan wewenang masing-masing dalam struktur organisasi. Dibawah ini ada beberapa tugas dan wewenang dalam struktur organisasi KPRI Prima Husada Bangkinang, antara lain :

4.2.1 Rapat Anggota

Rapat anggota koperasi adalah rapat yang di hadiri oleh anggota koperasi yang pelaksanaannya diatur oleh anggaran dasar dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi, yang merupakan pencerminan demokrasi dalam suatu organisasi koperasi. Sesuai dengan kewenangannya maka rapat anggota :

1. Menetapkan kebijaksanaan umum serta pelaksanaan keputusan-keputusan koperasi yang lebih atas
2. Menetapkan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
3. Menetapkan rencana kerja, anggaran pendapatan belanja, pengesahan neraca, kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi, dan perusahaan
4. Melaksanakan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
5. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha (SHU)
6. Menetapkan penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi

4.2.2Pengurus

1. Pengurus berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Ketua bertugas untuk bertanggung jawab secara umum, pembinaan terhadap karyawan, memonitor program koperasi, menghadiri undangan – undangan dan membuat laporan pertanggungjawaban.
 - b. Sekretaris bertugas untuk mengurus administrasi organisasi koperasi, mengatur dan mempersiapkan rapat, membantu pengurus pendidikan dan pelatihan, dan membantu pengelolaan toko.
 - c. Bendahara bertugas untuk mengurus pembukuan keuangan, membuat laporan keuangan triwulan dan tahunan, mengusahakan tambahan modal untuk koperasi, dan bersama pengurus lain menyelesaikan kewajiban KPRI Prima Husada.
2. Bila terjadi pengunduran diri atau perpindahan tugas personil pengurus keluar dari Kecamatan Bangkinang Kota, Bangkinang, Salo, Kuok dan Kampar, maka harus dilakukan pergantian antar waktu yang diambil dari anggota (bukan personil pengawas) melalui rapat gabungan antara pengurus dan pengawas KPRI Prima Husada dan keputusan tersebut dituangkan secara tertulis dalam buku notula rapat yang kemudian dilaporkan didalam rapat anggota tahunan.
3. Keputusan hasil rapat pengurus harus tertulis dalam buku notula rapat pengurus, khusus keputusan yang sifatnya strategis yang akan mempengaruhi jalannya usaha koperasi harus dilaporkan secara tertulis kepada pengawas.
4. Minimal 4 kali dalam setahun pengurus harus mengirimkan laporan kepada pejabat mengenai perkembangan usaha koperasi.

4.2.3 Pengawas

Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi sebagai berikut :

1. Ketua bertugas untuk mewakili ketua 1 apabila berhalangan, mengurus pendidikan dan pelatihan, mengelola pertokoan, mempersiapkan rapat anggota tahunan, dan mengelola investasi koperasi.
2. Sekretaris bertugas untuk mengurus administrasi organisasi koperasi, mengatur dan mempersiapkan rapat, membantu pengurus pendidikan dan pelatihan, dan membantu pengelolaan toko.
3. Anggota bertugas untuk membantu kegiatan pengelolaan toko yang dimiliki koperasi, anggota juga mempunyai tugas membantu fungsi lain apabila fungsi lain sedang membutuhkan anggota, jadi anggota memiliki tugas yang fleksibel dimana anggota bisa ditempatkan difungsi manapun yang bisa membutuhkan bantuan.

4.2.4 Unit Simpan Pinjam

Tugas dari unit simpan pinjam adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghimpun dana
2. Menyalurkan / memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

4.2.5 Unit Photo Copy & ATK

Tugasnya antara lain :

1. Mengphotocopy jika ada anggota yang mau photocopy
2. Menjual barang – barang harian dan keperluan untuk kantor lainnya
3. Menjual berbagai kebutuhan sehari – hari

4. Memprint jika ada anggota yang mau print

4.2.6 Unit Waserba

Bertugas sebagai berikut :

1. Setiap anggota yang berbelanja diharuskan mengisi buku / daftar belanja
2. Meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan barang – barang yang diperlukan oleh anggota

4.2.7 Unit Penginapan

Bertugas sebagai berikut :

1. Menyediakan tempat penginapan atau mess jika ada anggota yang mau menginap

4.2.8 Unit Kursi & Tenda

Bertugas untuk :

1. Menyiapkan kursi dan tenda apabila anggota memerlukannya
2. Menyewakan kursi dan tenda

4.2.9 Unit Aula

Bertugas untuk :

1. Menyewakan aula kepada siapa yang mau menyewa

4.3.0 Kasir

1. Menghitung orang yang belanja
2. Mencatat jika ada anggota yang berhutang
3. Menyetor kalau ada uang

4.3.1 Penjaga Malam

Bertugas sebagai berikut :

1. Untuk menjaga keamanan disekitar koperasi
2. Menjaga apabila ada maling

4.3 Visi dan Misi KPRI Prima Husada

4.3.1 Visi KPRI Prima Husada

Mewujudkan KPRI Prima Husada menjadi salah satu koperasi yang mandiri, demokratis, berkeadilan dan terdepan dalam melayani kebutuhan anggota.

4.3.2 Misi KPRI Prima Husada

1. Memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik anggota maupun masyarakat umum dengan pelayanan prima.
2. Meningkatkan kemampuan kinerja organisasi
3. Memberikan kemudahan kepada anggota dalam memenuhi kebutuhannya
4. Meningkatkan kesejahteraan anggota

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam memberikan kredit dari pihak koperasi sering mengalami kerugian karena kurangnya ketelitian dalam pemberian kredit nya. Pasti ada penanganan dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan menentukan faktor apa saja yang menyebabkan kredit tersebut bermasalah. Oleh karena itu, pihak koperasi menjalankan atau mengelola kreditnya dengan membentuk suatu aturan atau tata cara pengelolaannya agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan pihak koperasi.

5.1 Analisis Deskriptif Penyelesaian Kredit Bermasalah

5.1.1 Penanganan Kredit Bermasalah

Berdasarkan dari data terjadinya kredit bermasalah pihak koperasi melakukan penanganan kredit bermasalah dengan melakukan upaya – upaya sebagai berikut :

a. *Reschedulling* (Penjadwalan Kembali)

Merupakan suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang, termasuk jumlah angsuran dan bila perlu dengan penambahan kredit. Cara ini dilakukan berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan pihak koperasi, pihak debitur tidak mampu dalam melunasi kewajibannya membayar angsuran pokok maupun kewajiban lainnya.

Anggota yang sudah mendapatkan *reschedulling* dari tahun 2015 sebanyak 25 orang, tahun 2016 sebanyak 55 orang, dan pada tahun 2017 sebanyak 45

orang. Setelah dilakukan dengan cara penanganan *reschedulling* mengalami perubahan setiap tahunnya. *Reschedulling* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Memperpanjang Jangka Waktu Kredit

Dalam memperpanjang jangka waktu kredit, debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pelunasan kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari sepuluh bulan menjadi dua belas bulan, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama dalam mengembalikan pinjamannya. Anggota yang sudah mendapatkan memperpanjang jangka waktu kredit pada tahun 2015 sebanyak 13 orang, tahun 2016 sebanyak 25 orang, dan pada tahun 2017 sebanyak 22 orang.

2. Memperpanjang Jangka Waktu Angsuran

Hal ini hampir sama dengan jangka waktu kredit, jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 48 kali menjadi 60 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Anggota yang telah mendapatkan memperpanjang waktu angsuran pada tahun 2015 sebanyak 12 orang, pada tahun 2016 sebanyak 30 orang, dan pada tahun 2017 sebanyak 23 orang.

b. Surat Teguran

Pihak KPRI Prima Husada melakukan tahap kedua ini apabila tahap pertama belum dijalankan jadi pengurus koperasi melakukan surat teguran kepada anggota yang lalai dalam membayar angsurannya tiap bulan. Pihak Kpri yang sudah memberikan surat teguran kepada anggota pada tahun 2015 sebanyak 18 orang, tahun 2016 sebanyak 20 orang, dan pada tahun 2017 sebanyak 15 orang.

c. Dalam 3 Bulan SP I

Jika kedua tahap diatas tidak dapat dipenuhi oleh anggota maka pihak KPRI Prima Husada melakukan tindakan dengan memberikan surat peringatan dalam 3 bulan dengan prosedur, sebagai berikut :

1. Pihak koperasi dalam 3 bulan akan memberikan surat peringatan I langsung kepada debitur, penjelasan yang disampaikan akibat atas keterlambatan tentang jumlah pokok angsuran, jumlah bunga pinjaman. Selain itu, surat tersebut tidak hanya ditujukan kedebitur yang terkait, namun berisi tembusan ke pihak : kepala kantor yang bersangkutan serta bendahara yang bersangkutan.
2. Jika butir a tidak dipenuhi oleh debitur, pengurus koperasi akan menindaklanjuti debitur dengan memberikan surat peringatan yang ke II dengan isi surat tersebut tentang pembayaran yang harus dilunasi dengan tembusan yang sama yaitu kepala kantor yang berurusan, bendahara kantor yang berurusan untuk menyelesaikan pinjaman

(diperpanjang atau dilunasi). Jika debitur tidak ada menunjukkan etikad untuk melunasi pinjaman tersebut.

3. Jika surat peringatan ke II debitur tersebut tidak ada menunjukkan etikad untuk melunasi hutang tersebut. Pengurus koperasi memanggil dengan surat peringatan ke III yang ditujukan langsung pada debitur dengan tembusan kepala kantor yang bersangkutan dan bendahara kantor yang bersangkutan.
4. Pengurus koperasi mendatangi langsung debitur jika dengan surat ke III debitur tidak datang melunasi keseluruhannya, pengurus koperasi mendata kembali secara detail tentang keadaan debitur, mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan untuk keputusan akhir. Anggota yang sudah mendapatkan SP 1 dalam 3 bulan pada tahun 2015 sebanyak 16 orang, tahun 2016 sebanyak 7 orang, dan pada tahun 2017 sebanyak 17 orang.

5.2 Analisis Deskriptif Penyebab Kredit Bermasalah

5.2.1 Faktor Penyebab

Berdasarkan tinjauan ke lokasi KPRI Prima Husada Bangkinang, bahwa ada beberapa masalah yang menyebabkan kemacetan kredit yang terjadi pada KPRI Prima Husada yaitu adalah:

1. Faktor Internal

- a. Masih lemahnya dalam prosedur pemberian kredit mengakibatkan anggota lalai dalam membayar angsuran, karena dalam memberikan prosedur pemberian kredit hanya dilakukan dengan pengamatan

langsung dan wawancara saja tanpa ada standar tertulis, maka dari itu anggota tidak ada dijadikan pedomannya.

- b. Lemahnya dalam persyaratan permohonan pemberian kredit yang hanya menggunakan slip gaji bagi yang meminjam dibawah Rp 50.000.000, sedangkan yang meminjam diatas Rp 50.000.000 baru memakai jaminan atau agunan berupa sertifikat tanah, BPKB mobil/motor, dan SK PNS.

2. Faktor Eksternal

- a. Anggota yang sudah melakukan pinjaman di koperasi masih melakukan pinjaman diluar Koperasi tanpa sepengetahuan pengurus Koperasi, sehingga koperasi kebingungan dan kesulitan dalam penagihan karena ternyata anggota memiliki hutang tidak hanya di KPRI saja tapi ditempat lain juga.
- b. Anggota yang meminjam ditempat lain tidak dapat membayar angsuran pinjaman setiap bulan dan mengakibatkan penunggakan, anggota yang meminjam ditempat lain dan gaji yang kurang bisa menyebabkan anggota tidak sanggup membayar angsuran setiap bulannya sehingga terjadinya kredit bermasalah.

Adapun yang di katakan kredit bermasalah adalah kredit yang dalam pembayarannya mengalami penunggakan yang sudah mencapai batas-batas yang telah di tentukan oleh koperasi, adapun batas-batas yang di katakan kredit bermasalah adalah dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini :

Tabel 5.2

Kriteria Kolektabilitas Kredit Pada KPRI Prima Husada Bangkinang

No	Kriteria	Lamanya (hari)
1	Kurang Lancar	30
2	Diragukan	60
3	Macet	90

Dari data pada tabel 5.2 di atas maka dapat dilihat dari data kriteria bahwa kurang lancar adalah apabila kredit tidak dibayar selama 30 hari atau sebulan, dikatakan kredit diragukan apabila kredit tidak dibayar selama 60 hari atau 2 bulan, dan kredit macet apabila kredit tidak dibayar selama 90 hari atau 3 bulan dalam proses perkreditannya.

Sebelum dilakukannya penanganan kredit bermasalah maka dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawa ini tentang banyaknya jumlah kredit bermasalah disetiap tahunnya, yang terjadi di KPRI Prima Husada yang dalam pembayaran kreditnya mengalami penunggakan.

Tabel 5.3

Laporan Data Nasabah Berdasarkan Kolektabilitas Pada KPRI Prima Husada
Kabupaten kampar Kota Bangkinang Tahun 2015-2017

Tahun	Keterangan	Kredit Lancar	Kredit Kurang Lancar	Kredit Diragukan	Kredit Macet
2015	Jumlah Rekening (orang)	519	8	5	46
	Jumlah Saldo (Rupiah)	24.295.200.000	510.000.000	275.150.000	2.353.700.000
2016	Jumlah Rekening (orang)	453	13	10	59
	Jumlah Saldo (Rupiah)	21.197.700.000	782.500.000	594.500.000	3.179.700.000
2017	Jumlah Rekening (orang)	438	6	3	63
	Jumlah Saldo (Rupiah)	20.263.500.000	360.000.000	245.000.000	3.964.400.000

(Sumber : KPRI Prima Husada Bangkinang Tahun 2015-2017)

Dari tabel di atas dapat kita lihat jumlah kredit bermasalah ditahun 2015-2017, dari data diatas dapat dilihat kredit kurang lancar paling tinggi terjadi pada tahun 2016, kredit diragukan paling tinggi terjadi pada tahun

2016, dan kredit macet paling tinggi terjadi pada tahun 2017, dan dari data di atas kita dapat melihat nilai kredit bermasalah dari KPRI Prima Husada.

Tabel 5.4

Hasil NPL Pada KPRI Prima Husada Bangkinang Berdasarkan
Persentase Pada Tahun 2015 – 2017

No	Tahun	Jumlah (KL,D,M) (Rupiah)	Total Kredit (Rupiah)	NPL (%)
1	2015	2.256.170.302	27.434.050.000	8,2%
2	2016	3.437.473.799	25.971.900.000	13,2%
3	2017	4.474.932.033	24.822.900.000	18%

(Sumber : KPRI Prima Husada Bangkinang Tahun 2015-2017)

Keterangan : KL : Kurang Lancar

D : diragukan

M : Macet

Berdasarkan tabel 5.4 diatas dapat dilihat bahwa KPRI Prima Husada yang dihitung pertahun dari tahun 2015 sampai tahun 2017 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 persentase NPL sebesar 8,2%, pada tahun 2016

NPL meningkat sebesar 13,2% dan di tahun 2017 NPL kembali meningkat drastis sebesar 18%. Sehingga dapat dikatakan NPL pada tahun 2017 mengalami kenaikan drastis.

Data jumlah kredit kurang lancar, diragukan dan kredit macet. Dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 5.5

Data *Range Account* nya kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet pada Tahun (2015 – 2017)

Tahun	Keterangan	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2015	<i>Range Account</i>	Rp.91.000.000 – Rp. 100.000.000	Rp.51.000.000 – Rp. 60.000.000	Rp.91.000.000 – Rp.100.000.000
2016	<i>Range Account</i>	Rp. 41.000.000 – Rp. 50.000.000	Rp. 61.000.000 – Rp. 70.000.000	Rp. 91.000.000 – Rp. 100.000.000
2017	<i>Range Account</i>	Rp. 51.000.000 – Rp. 60.000.000	Rp. 31.000.000 – Rp. 40.000.000	Rp. 91.000.000 – Rp. 100.000.000

(Sumber : KPRI Prima Husada Bangkinang Tahun 2015 – 2017)

Berdasarkan dari data tabel diatas dapat kita lihat dari tahun 2015 kredit kurang lancar *range account* nya dari Rp 91.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 sebanyak 3 orang, kredit diragukan Rp. 51.000.000 sampai dengan Rp. 60.000.000 sebanyak 3 orang, dan kredit macet dari Rp. 91.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000 sebanyak 10 orang, pada tahun

2016 kredit kurang lancar *range account* nya dari Rp 41.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000 sebanyak 3 orang, kredit diragukan dari Rp. 61.000.000 sampai dengan Rp. 70.000.000 sebanyak 4 orang, dan kredit macetnya dari Rp. 91.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000 sebanyak 12 orang, dan terakhir dilihat dari data tahun 2017 kredit kurang lancar *range account* nya dari Rp. 51.000.000 sampai dengan Rp. 60.000.000 sebanyak 2 orang, kredit diragukan dari Rp 31.000.000 sampai dengan Rp. 40.000.000 sebanyak 2 orang, dan yang terakhir pada kredit macet dari Rp 91.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000 sebanyak 17 orang.

5.3 Analisis Deskriptif Prosedur Pemberian Kredit

Dimana prosedur pemberian kredit bertujuan untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan permohonan peminjam dan penilaian kredit yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak koperasi dapat meminta kembali ke anggota atau bahkan langsung ditolak. Dibawah ini hasil penelitian setelah wawancara dengan ketua koperasi dan beberapa anggota yang meminjam, yaitu :

5.3.1 Permohonan Pemberian Kredit

Hasil wawancara dengan Ketua KPRI Prima Husada mengatakan dalam prosedur pemberian kredit, anggota harus terlebih dahulu menjadi anggota KPRI Prima Husada, PNS, menulis surat permohonan kepada pengurus koperasi buat meminjam, peminjaman diatas Rp.50.000.000

memakain jaminan atau agunan berupa sertifikat tanah, BPKB mobil / motor, dan dokumen – dokumen yang berharga, tetapi peminjaman dibawah Rp.50.000.000 hanya melampirkan surat permohonan sama slip gaji saja, slip gaji digunakan untuk kalau membayar angsuran setiap bulan hanya dilakukan pemotongan gaji.

Hasil wawancara dengan anggota pertama (1) mengatakan prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh KPRI Prima Husada ini sangatlah mudah hanya dengan melakukan anggota mengajukan permohonan kepada pengurus, pengurus memberikan analisa apakah ini layak diberikan pinjaman atau tidak baru nanti dipanggil peminjamannya. Setelah anggota yang meminjam dipanggil baru dilakukan wawancara, setelah kita mewawancarai anggota, menurut kita layak diberikan berarti kita berikan pinjaman. Yang kita tanyakan dalam wawancara apakah anggota yang bersangkutan mampu membayar angsuran setiap bulannya, dari jawaban anggota tersebut baru bisa kami putuskan berapa bisa anggota meminjam. Selain permohonan diatas prosedur pemberian kredit KPRI Prima Husada harus terlebih dahulu menjadi anggota atau PNS, jujur dan kemungkinan bisa untuk pengembalian pinjaman.

Hasil wawancara dengan anggota ke II (dua), mengatakan prosedur pemberian kredit yang diberikan KPRI Prima Husada hanya mengajukan surat permohonan dan dilampirkan dengan sertifikat kalau peminjaman diatas Rp.50.000.000 dan pemotongan gaji.

Hasil wawancara dengan anggota ke III (tiga), mengatakan dalam memberikan prosedur pemberian kredit, syarat wajibnya harus menjadi anggota terlebih dahulu, dan mengajukan surat permohonan berupa jaminan atau agunan berupa serifikat tanah, Sk PNS kalau meminjam diatas Rp.50.000.000.

5.3.2 Penilaian Kredit

Hasil wawancara dengan Ketua KPRI Prima Husada, mengatakan dalam memberikan prosedur pemberian kredit kami memperhatikan prinsip 5C dimana 5C itu adalah *Character, capital, capacity, condition dan collateral*. Karena kami menganalisa dari perilaku anggota, kemampuan anggota untuk membayar walaupun gaji atau pendapatan anggota sedikit tapi anggota bisa membayar angsuran pihak KPRI Prima Husada memberikan pinjaman, kondisi ekonomi anggota apakah anggota nanti mampu membayar atau tidak.

5.3.2.1 Character

Dilihat dari hasil wawancara koperasi melakukan penilaian kredit dengan cara melihat sifat atau watak anggota atau debitur tersebut dengan cara sebelum anggota melakukan peminjaman KPRI terlebih dahulu melihat sifat dari anggota apakah anggota tersebut jujur dan ada kemauan untuk membayar angsuran pinjaman yang telah dipinjamkan setiap bulannya, dan tidak mempunyai kebiasaan atau kepribadian dalam tidak membayarkan angsuran pinjamannya.

Kalau seandainya anggota tersebut jujur dan tabiatnya sangat baik maka pihak KPRI akan memberikan pinjaman kepada anggota, meskipun anggota tersebut dengan penghasilan yang rendah.

5.3.2.2Capacity

Dari hasil wawancara dengan koperasi melihat dari kemampuan anggota dalam membayar pinjamannya dengan cara KPRI mewawancarai anggota, yang kita tanyakan dalam wawancara tersebut menanyakan apakah yang bersangkutan mampu membayar angsuran setiap bulannya, dari jawaban anggota tersebut baru bisa kami memutuskan berapa anggota bisa meminjamkan.

5.3.2.3Capital

Dari hasil wawancara dengan pihak koperasi melakukan penilaian dari modal anggota tersebut, tetapi koperasi tidak selalu melihat dari sumber – sumber penghasilan anggota. Karena tidak semua anggota yang meminjam di koperasi dilakukan untuk modal usaha atau pengahasilan lainnya, sebagian untuk kebutuhan sehari-hari, biaya anak sekolah dan untuk memperbaiki rumah, dan keperluan lainnya. Jadi pihak KPRI Prima Husada tidak terlalu melihat dari sisi *capital* nya.

5.3.2.4Collateral

Hasil wawancara dengan pihak koperasi yang dilihat dari sisi jaminan, Kpri memberikan jaminan hanya kepada anggota yang meminjam diatas Rp 50.000.000 dengan jaminan sertifikat tanah, Sk PNS dan surat berharga lainnya, tetapi pinjaman dibawah Rp 50.000.000 tidak memakai jaminan hanya slip gaji saja. Jika jaminan sudah dipenuhi maka pihak KPRI bisa memberikan pinjaman.

5.3.2.5 Condition

Hasil wawancara dari koperasi Prima Husada dalam melihat penilaian berdasarkan kondisi ekonomi anggota dengan cara, melihat kondisi ekonomi anggota apakah berjalan lancar, tidak ada masalah dan tidak mempengaruhi pembayaran pinjaman perbulannya. Maka pihak KPRI tidak memperlmasalahkannya, karena kalau kondisi ekonomi anggota lancar dan bagus berarti anggota tersebut bisa membayar angsurannya setiap bulan.

5.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa dalam penanganan penyebab kredit bermasalah dan menentukan faktor – faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, terlebih dahulu kita melihat prosedur pemberian kredit kepada anggota, apakah pihak koperasi sudah menjalankan dengan baik dan benar. Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana cara penanganan kredit bermasalah dan faktor apa saja yang menyebabkan kredit bermasalah tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan bagaimana cara prosedur dalam pemberian kredit.

5.4.1 Penyelesaian Kredit Bermasalah

Dan dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan penanganannya yang menggunakan *reschedulling* (penjadualan kembali), melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk masa tenggang, *Reschedulling* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : (a) memperpanjang jangka waktu kredit, debitur diberikan keringan dalam jangka waktupelunasan kredit, misalnya

perpanjangan waktu kredit dari lima bulan menjadi tujuh bulan, sehingga debitur bisa mempunyai waktu yang lebih lama dalam membayar pinjamannya, (b) memperpanjang jangka waktu angsuran, hal ini hampir sama dengan memperpanjang jangka waktu kredit, jangka waktu angsurannya diperpanjang pembayarannya, seperti dari 58 kali menjadi 70 kali dal hal ini tentu saja jumlah angsuran debitur lebih menjadi kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

Tahap kedua yang dilakukan dalam penanganan kredit bermasalah pada KPRI Prima husada adalah surat teguran dimana surat teguran ini dilakukan apabila anggota tidak mau membayar apa yang telah dikatakan pada tahap 1, maka pihak KPRI melakukan surat teguran kepada anggota yang menunggak.

Sedangkan tahap ketiga dalam penanganan kredit bermasalah adalah dengan cara dalam 3 bulan pihak koperasi memberikan SP 1, sebagai berikut :

1. Pihak koperasi dalam 3 bulan akan memberikan surat peringatan I langsung kepada debitur, penjelasan yang disampaikan akibat atas keterlambatan tentang jumlah pokok angsuran, jumlah bunga pinjaman. Selain itu, surat tersebut tidak hanya ditujukan kedebitur yang terkait, namun berisi tembusan ke pihak : kepala kantor yang bersangkutan serta bendahara yang bersangkutan.
2. Jika butir 1 tidak dipenuhi oleh debitur, pengurus koperasi akan menindaklanjuti debitur dengan memberikan surat peringatan yang ke II dengan isi surat tersebut tentang pembayaran yang harus dilunasi dengan tembusan yang sama yaitu kepala kantor yang berurusan, bendahara kantor yang berurusan untuk menyelesaikan pinjaman (diperpanjang

atau dilunasi). Jika debitur tidak ada menunjukkan etiked untuk melunasi pinjaman tersebut.

3. Jika surat peringatan ke II debitur tersebut tidak ada menunjukkan etiked untuk melunasi hutang tersebut. Pengurus koperasi memanggil dengan surat peringatan ke III yang ditujukan langsung pada debitur dengan tembusan kepala kantor yang bersangkutan dan bendahara kantor yang bersangkutan.
4. Pengurus koperasi mendatangi langsung debitur jika dengan surat ke III debitur tidak datang melunasi keseluruhannya, pengurus koperasi mendata kembali secara detail tentang keadaan debitur, mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan untuk keputusan akhir.

5.4.2 Penyebab Kredit Bermasalah

Berdasarkan informasi dari koperasi ada beberapa masalah yang menyebabkan kredit macet terjadi pada KPRI Prima Husada yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal masih lemahnya dalam prosedur pemberian kredit yang hanya melakukan wawancara saja kepada amggota yang meminjam dan tidak melakukan penilaian secara tertulis. Dan yang kedua dari faktor internal adalah tidak ada jaminan yang bisa membuat anggota takut kalau lalai atau terlambat dalam membayar angsuran kredit tersebut.

Sedangkan dari faktor eksternal adalah anggota yang sudah meminjam di KPRI Prima Husada, masih melakukan pinjaman diluar koperasi, dan pihak koperasi tidak mengetahuinya. Sehingga anggota yang meminjam diluar koperasi lalai membayar angsuran dan menunggak yang menyebabkan kredit tersebut menjadi macet.

Kredit macet tidak hanya merugikan koperasi karena tertahannya modal kerja pada piutang yang beredar tetapi juga dapat menghambat anggota lain yang membutuhkan pinjaman.

5.4.3 Prosedur Pemberian Kredit

Dalam prosedur pemberian kredit yang ada di KPRI Prima Husada syarat wajib harus menjadi anggota KPRI Prima Husada baru bisa mengajukan surat permohonan, kalau peminjaman diatas Rp 50.000.000 maka surat permohonan dilampirkan jaminan atau agunan berupa sertifikat tanah, BPKB mobil / motor, dan SK PNS. Tetapi kalau pinjaman dibawah Rp 50.000.000 hanya melampirkan surat permohonan sama slip gaji saja.

Dalam penilaian pemberian kredit koperasi menerapkan prinsip 5C, dimana koperasi masih melihat perilaku anggota, kemampuan anggota, dan kondisi ekonomi anggota. Tetapi KPRI tidak melihat berapa banyak atau sedikit gaji / pendapatan anggota, semua anggota bisa meminjam di KPRI tersebut. Meskipun KPRI Prima Husada sudah menerapkan prinsip 5C tetapi masih menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Karena pihak KPRI melakukan prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit masih terbilang relatif mudah dan syaratnya pun hanya menjadi anggota dan PNS saja. Dan koperasi tidak menggunakan jaminan berupa barang yang bergerak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Saparida, Parijo, F.Y Khomas (2016) menyatakan bahwa ada beberapa masalah pada penilaian pemberian kredit pada koperasi karyawan tirta dharma. Secara umum dalam kegiatan pemberian kredit koperasi karyawan tirta dharma belum sepenuhnya menjalankan prosedur – prosedur yang sudah ditetapkan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah di uraikan diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Upaya yang ditempuh Oleh KPRI Prima Husada untuk menangani kredit bermasalah adalah dengan cara melalui penjadwalan ulang hutang – hutang (*reschedulling*) dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit dan angsuran, memberikan surat teguran dan dalam 3 bulan diberikan SP
- b. Faktor penyebab kredit macet ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah anggota yang tidak jujur dan persyaratan yang terlalu mudah sedangkan dari faktor eksternal adalah anggota yang meminjam diluar KPRI Prima Husada.
- c. Prosedur pemberian kredit kepada anggota masih relatif mudah yang hanya mengajukan permohonan pemberian kredit, bagi anggota yang meminjam diatas lima puluh juta rupiah baru menggunakan jaminan atau agunan berupa sertifikat tanah, sedangkan pinjaman dibawah lima puluh juta rupiah hanya surat permohonan saja sama slip gaji. Sedangkan dalam penilaian kredit hanya dilakukan dengan pengamatan langsung dan wawancara, tanpa ada standar tertulis sehingga tidak ada dijadikan pedoman bagi anggota yang meminjam.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pihak – pihak yang terkait, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Pihak KPRI Prima Husada

Pihak koperasi lebih memperhatikan prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit, jangan hanya melakukan wawancara saja kepada anggota yang meminjam, dan juga kalau bisa jaminannya berupa barang bergerak, biar tidak terjadi lagi yang namanya kredit bermasalah.

2. Pihak Anggota

Bagi anggota sebelum melakukan pinjaman dilihat dulu berapa sanggup membayar angsuran pinjaman tersebut.

3. Pihak Penelitian Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya lebih banyak mempelajari tentang apa itu kredit dan kredit bermasalah.

Daftar Pustaka

- Abi Manyu Sinulingga. 2017, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kredit bermasalah Pada Koperasi Pegawai Negeri Guru SD Kecamatan Binjai Barat. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- A. Rivai Wirasmita. MS, Drs. N. Kusno. HS, Dra. Erna Herlinawati. Y. 1990, Manajemen Koperasi. Cetakan Pertama, CV Pionir Jaya Bandung.
- Arifinal Chaniago, 1987. Perkoperasian Indonesia. Cetakan Trakhir. Angkasa. Bandung.
- Cesilia Dian Astika Sari. 2016, Analisis Kredit Bermasalah (studi kasus di credit union Cinderalas Tumangkar TP 02 Lorejo).
- Desi. 2019, Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Gonjong Limo Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat. Skripsi. Jurusan Manajemen, Universitas Islam Riau.
- Evi Fitriani. Analisis Penyelesaian Kredit bermasalah Pada PT. BPR Supra Bandung. STIE Ekuitas Bandung.
- I Nyoman Suarjaya, 2015. Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung.
- Kasmir, 2016. Analisis Laporan Keuangan. Cetakan ke 9. Rajawali. Jakarta
- Kasmir, 2015. Manajemen Perbankan. Edisi Revisi. Kharisma Putra Utama. Jakarta

Kasmir, 2014. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta

Mengelola Kredit Secara Sehat. Edisi Pertama. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Barat.

2018. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Pengawas. Bangkinang.

Mary Anna Hutagalung. 2015, Analisis Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Payung Negeri Bestari. Skripsi. Jurusan Manajemen, Universitas Islam Riau. Pekanbaru.

Muchdarsyah Sinungan. 1992. Manajemen Dana Bank. Edisi Kedua. PT. Bumi Aksara. Jakarta

Muchdarsyah Sinungan. 1993. Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit. Cetakan ke 7. Bumi Aksara. Jakarta

Ria Damayanti, 2015. Analisis Kredit Guna Penanggulangan Kredit Bermasalah Pada PT. PNM UlaMM Unit Ngelegok Kabupaten Blitar.

Rini Gustifa. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Padang.

Rini Saputri. 2015, Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Pekanbaru.

Saparida, Parijo, F.Y Khosmas. 2013, Analisis Kredit Macet Pada Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa Kota Pontianak. Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Untan, Pontianak.

Septi Febriana, 2018. Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Bahagia Kota Kediri. Skripsi. Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Thomas Suyatno, dkk. Dasar-dasar Perkreditan. Edisi Ketiga. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Widodo, 2017. Metodologi Penelitian. Edisi Pertama, Rajawali Pers. Jakarta.

